

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Niswatun Mujahidah (2021)

Meneliti penerapan SAK EMKM pada UKM CV. Ilham Lestari Medan. Pengumpulan data dengan metode studi lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga diketahui bahwa CV Ilham Lestari Medan hanya menyusun buku kas, gaji karyawan, dan laporan laba rugi secara sederhana dan tidak sesuai dengan SAK EMKM. Hasil analisis deskriptif kualitatif, entitas perlu menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dengan tujuan mengetahui kinerja serta posisi keuangan lebih akurat dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

2. Tiara Resa Pristi Dwi Yanti (2024)

Meneliti penerapan SAK EMKM di UMKM di Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Teknik pengumpulan data berdasarkan pengamatan, tanya jawab, dan dokumentasi, menunjukkan ketiga UMKM tersebut hanya mencatat berupa penjualan, pembelian bahan baku, kas masuk, kas keluar, serta tidak menyusun laporan keuangan secara lengkap. Hasil analisis deskriptif kualitatif perlu pembaharuan pencatatan laporan keuangan berstandar SAK EMKM sesuai perkembangan dunia bisnis dan sosialisasi dari pemerintah.

3. Fadia Ardhina (2023)

Melakukan studi kasus pengaplikasian SAK EMKM pada Kerajinan Batik Jambi Ariny Sentuhan Alam. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, menunjukkan bahwa karyawan menyusun laporan pemasukan dan pengeluaran secara manual, serta belum ada pemisahan antara penjualan dan beban. Hasil analisis deskriptif kualitatif perlu disusun laporan keuangan dengan rekomendasi penulis dan menyiapkan SDM yang berpengalaman.

4. Firyal Muti'ah (2021)

Meneliti pengaplikasian SAK EMKM pada UMKM Pengolahan Ikan Mba Noors. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dengan teknik wawancara dan observasi, sehingga ditemukan bahwa pemilik melakukan penyusunan laporan keuangan dengan mengandalkan kuitansi, nota, serta bukti lain dari kegiatan produksi berlangsung. Hasil analisis deskriptif kualitatif perlu dilakukan pencatatan dengan aplikasi BukuWarung.

5. Walmi Sholihat, Abdul Hairudin (2021)

Meneliti penerapan SAK EMKM untuk pelaporan keuangan di UMKM 7 Saudara Riau. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, menunjukkan bahwa pemilik belum menerapkan SAK EMKM dalam entitas bisnisnya yang disebabkan SDM yang belum memadai untuk penerapan SAK. Hasil analisis deskriptif kualitatif perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah setempat

mengenai implementasi SAK EMKM dan pemilik perlu menyiapkan SDM yang handal untuk menyusun laporan keuangan.

6. Innany Eva Nurjannah, Ihyaul Ulum, dan Tri Wahyu Okatviendi (2023)

Meneliti penerapan SAK EMKM untuk penyusunan laporan keuangan di Londi Laundry Malang. Metode pengumpulan data menggunakan survei dengan teknik wawancara sehingga diketahui bahwa pemilik telah menerapkan SAK EMKM tetapi belum 100% dan menggunakan aplikasi smartlink untuk penjualannya. Hasil analisis deskriptif kualitatif perlu disusun catatan atas laporan keuangan dan pengadopsian SAK EMKM pada aplikasi *smartlink*.

7. Nur Fadlila Wiji Lestari, Ruly Priantilianingtiasari (2023)

Meneliti penerapan SAK EMKM pada CV. Subur Makmur Tulungagung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, menunjukkan pencatatan laporan keuangan entitas masih sederhana meliputi penjualan, pembelian barang, utang gaji, pemeliharaan aset tetap dan beban gaji karyawan yang dientri menggunakan komputer. Hasil analisis deskriptif kualitatif perlu dilakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar berdasarkan rekomendasi penulis.

8. Rika Utari, Isnaini Harahap, dan Muhammad Syahbudi (2022)

Meneliti penerapan SAK EMKM pada 98 UMKM di Kota Tanjungbalai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi, menunjukkan hanya 12 UMKM yang

menerapkan SAK EMKM, yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman, dan menganggap laporan keuangan hanya untuk perusahaan besar. Hasil analisis deskriptif kualitatif perlu adanya pelatihan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi LAMIKRO, SI APIK, dan Akuntansi UKM yang telah mengadopsi SAK EMKM.

9. Baiq Widiastiawati dan Denni Hambali (2020)

Meneliti penerapan SAK EMKM di UD Sari Bunga untuk penyusunan laporan keuangan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara, menunjukkan pemilik belum mengerti standar yang berlaku, dan melakukan pencatatan secara sederhana sekedar kas masuk dan kas keluar. Hasil analisis deskriptif kualitatif perlu merekrut tenaga akuntansi yang berkompeten dan sosialisasi terkait SAK EMKM.

10. Sastri Ayu Lestari dan Andi Mulyono (2023)

Meneliti penerapan SAK EMKM pada UMKM Robbani Snack Mataram. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi menunjukkan penyusunan laporan keuangan entitas masih dilakukan secara manual karena, karyawan maupun pemilik belum mengerti *software*. Hasil analisis deskriptif kualitatif perlu merekrut SDM yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi, dan pelatihan pencatatan akuntansi berbasis *software*.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021), Raymond Budimann (2021), dan Henry (2021), laporan keuangan adalah dokumen atau informasi keuangan dalam suatu periode milik perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan dan merupakan *output* dari rangkaian pencatatan transaksi keuangan suatu entitas. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016:2) dan Kasmir (2018), laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi kinerja keuangan suatu entitas meliputi posisi keuangan (aset, liabilitas, dan ekuitas), arus kas, serta laporan perubahan ekuitas, juga pengungkapan berupa catatan atas laporan keuangan. Di samping memiliki tujuan, laporan keuangan juga memiliki sifat yaitu (1) historis, yakni laporan keuangan disusun dengan data keuangan dari satu tahun atau lebih sebelum periode sekarang dan (2) komprehensif, memiliki maksud laporan keuangan perlu disusun dengan sangat lengkap dan sesuai PSAK yang berlaku (Kasmir, 2018).

2. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Menurut IAI (2025), standar akuntansi keuangan merupakan pedoman untuk menyusun laporan keuangan agar informasi keuangan yang disajikan memenuhi syarat relevan, andal, dan dapat dibandingkan oleh para pemangku kepentingan. Di Indonesia IAI menyusun dan mengembangkan SAK yaitu :

- a. SAK (Standar Akuntansi Keuangan) merupakan standar yang mengatur prinsip, metode, dan prosedur akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.
- b. SAK EMKM merupakan sebuah standar akuntansi yang dibuat khusus untuk UMKM.
- c. SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.
- d. SAK EP merupakan standar akuntansi untuk entitas privat.
- e. SAK Syariah merupakan standar akuntansi yang memenuhi prinsip syariah.

3. Karakteristik Laporan Keuangan

IAI membahas karakteristik laporan keuangan (PSAK, 2025) antara lain:

- a. Penyajian Laporan Keuangan secara Wajar dan Mematuhi SAK Indonesia

Laporan keuangan harus disajikan secara akurat dan dapat diandalkan serta dibandingkan, juga mudah dipahami. Apabila entitas telah menerapkannya sesuai dengan SAK yang berlaku, maka penyajiannya dapat dievaluasi secara wajar.

- b. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun guna mengukur kapabilitas entitas dalam menjaga keberlangsungan usaha. Apabila terdapat ketidakpastian material sesuai peristiwa atau kondisi yang meragukan, entitas. mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika selama

periode tertentu suatu entitas berhasil memperoleh keuntungan dan dapat mengakses sumber dana maka entitas tersebut memenuhi syarat kelangsungan usaha.

c. Dasar Akrua

Pengakuan transaksi keuangan pada saat kejadian (akrua), bukan berbasis pada saat kas dan setara kas dikeluarkan atau diterima (*cash basis*). Laporan keuangan entitas dibuat dengan dasar akrua, dengan pengecualian pada laporan arus kas. Ketika akuntansi usaha menerapkan basis akrua, maka entitas wajib mengakui setiap pos-posnya.

d. Materialitas dan Penggabungan

Laporan keuangan terbentuk dari pengelompokan transaksi dan peristiwa lain berdasarkan sifat dan fungsinya. Pada akhir proses, data yang telah diringkas dan diklasifikasikan akan membentuk pos dalam laporan keuangan. Pos-pos individual yang tidak material dapat disatukan dengan pos lain atau ditampilkan secara terpisah dalam laporan keuangan.

e. Saling Hapus

Entitas menyajikan pendapatan, beban, liabilitas, dan asetnya secara independen. Kecakapan pengguna laporan keuangan dalam memahami transaksi atau peristiwa lainnya berkurang karena adanya unsur saling hapus di laporan keuangan.

f. Frekuensi Pelaporan

Penyajian laporan keuangan suatu entitas harus lengkap setidaknya sekali dalam setahun. Entitas harus menjelaskan alasan pemilihan periode yang digunakan baik jangka panjang atau pendek. Umumnya laporan keuangan disusun untuk periode satu tahun, namun agar lebih praktis beberapa entitas memilih periode pelaporan 52 minggu.

g. Informasi Komparatif

Mencakup informasi komparatif minimum yaitu entitas penyajian data dari periode sebelumnya untuk setiap angka dalam laporan keuangan periode berjalan. Informasi komparatif tambahan merujuk pada data yang disajikan di luar ketentuan minimum yang diwajibkan oleh SAK Indonesia sebagai pelengkap.

h. Konsistensi Penyajian

Penyajian serta pengklasifikasian setiap pos di laporan keuangan seharusnya dijalankan secara konsisten untuk tiap periode, tetapi ada pengecualian apabila ada perubahan seperti yang disyaratkan di PSAK maka modifikasi dapat diijinkan.

4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Sumarwan (2022) berpendapat SAK merupakan suatu standar atau sebuah aturan baku yang diterapkan oleh akuntan dalam menjalankan pekerjaannya. Standar yang saat ini berlaku adalah hasil dari perubahan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun. SAK menjadi dasar untuk standarisasi penyusunan laporan keuangan tiap entitas.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI membuat aturan khusus untuk UMKM yang disebut SAK EMKM. Aturan ini resmi diberlakukan pada tahun 2024. Tujuannya adalah agar UMKM bisa menyusun laporan keuangan dengan lebih transparan, efisien, dan dapat dipercaya. SAK EMKM ditujukan untuk usaha kecil yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Aturan ini juga dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sederhananya, SAK EMKM merupakan versi yang lebih mudah dari standar akuntansi yang berlaku umum.

Beatrix dan Fulgensius (2022), menyatakan mayoritas penyusunan laporan keuangan UMKM belum diterapkan sesuai dengan SAK EMKM. Menurut ketentuan SAK EMKM, harta pribadi pemilik dan keuangan usaha harus dipisahkan, supaya laporan keuangan usaha tidak tergabung dengan keuangan pribadi pemiliknya.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Halim (2020 dalam Viska, 2021:61), UMKM adalah bisnis yang menghasilkan produk atau layanan dengan memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam lokal, keterampilan, dan seni tradisional. UMKM adalah kegiatan usaha yang berperan besar dalam membuka peluang kerja, mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Pratama (2022).

Masyarakat Indonesia telah menggunakan pedoman kriteria UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 sejak lama. Undang – Undang

tersebut memang masih berlaku sampai saat ini untuk mengatur asas, tujuan, prinsip, dan pemberdayaan. Peraturan Pemerintah terbaru yakni PP Nomor 7 Tahun 2021 pasal 35-36 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur kriteria UMKM sebagai berikut.

Tabel II.1
Kriteria UMKM sesuai PP UMKM
Tahun 2021

Keterangan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan Bersih	Rp 1.000.000.000 diluar tanah dan bangunan tempat usaha	Rp 1.000.000.000 – Rp 5.000.000.000 diluar tanah dan bangunan tempat usaha	Rp 5.000.000.000 – Rp 10.000.000.000 diluar tanah dan bangunan tempat usaha
Hasil Penjualan Tahunan	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000 – Rp 15.000.000.000	Rp 15.000.000.000 – Rp 50.000.000.000
Kepemilikan	Perorangan atau badan usaha	Perorangan atau badan usaha yang tidak tergabung dan bukan cabang perusahaan besar atau menengah.	Perorangan atau badan usaha yang tidak terkait dengan perusahaan kecil atau besar.

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021

Suryanti, dkk (2021) menyatakan bahwa perbedaan UMKM dengan perusahaan besar tidak hanya dilihat dari jumlah modal dan omzetnya saja, namun juga dari ciri-cirinya. Beberapa kondisi antara lain:

- a. Jenis komoditi/barang dalam usaha tidak tetap atau dapat berubah sewaktu-waktu.
- b. Lokasi usaha tidak tetap atau berpindah-pindah.

- c. Administrasi belum terlaksana, keuangan milik pribadi dan bisnis masih digabungkan.
- d. SDM yang ada di dalamnya belum memiliki pengetahuan dalam berwirausaha.
- e. Tingkat pendidikan rendah.
- f. Tidak memiliki NPWP atau izin usaha yang sah.

6. Pencatatan Transaksi dan Pengikhtisaran Akuntansi

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, terdapat beberapa tahapan penting yang dilakukan oleh entitas dalam mencatat dan mengikhtisarkan seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Tahapan-tahapan ini mencerminkan alur siklus akuntansi, dimulai dari pencatatan awal dalam jurnal, pengelompokan transaksi ke dalam buku besar, hingga penyusunan neraca saldo sebagai dasar dalam menyiapkan laporan keuangan yang utuh. Berikut ini merupakan penjelasan dari dokumen-dokumen akuntansi yang digunakan dalam proses tersebut.

a. Jurnal Umum

Menurut Christian (2020:18), jurnal umum merupakan tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis dalam periode akuntansi tertentu. Pencatatan jurnal umum bertujuan untuk menyediakan informasi dasar yang diperlukan dalam proses pengelompokan akun di buku besar dan penyusunan laporan keuangan. Bentuk jurnal umum disajikan pada tabel II.2 berikut ini,

Tabel II.2
Format Jurnal Umum

					Hal :
Tanggal	Keterangan		Reff	Debit	Kredit

Sumber : Suprapti, dkk (2022:4)

b. Jurnal Khusus

Menurut Hery (2016), jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi dan memiliki karakteristik yang sama, sehingga pencatatan dapat dilakukan lebih efisien dan sistematis. Jurnal khusus terdiri dari jurnal khusus penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Penggunaan jurnal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pencatatan dan mempercepat posting data transaksi ke buku besar, hal ini dapat meminimalisasi kesalahan pencatatan dan meningkatkan kecepatan dalam menyusun laporan keuangan. Bentuk jurnal khusus disajikan pada tabel II.3, II.4, II.5, dan II.6 berikut ini,

Tabel II.3
Format Jurnal Khusus Penjualan

					Hal:
Tanggal	No Faktur	Keterangan	Syarat	Reff	D: Piutang Dagang (Rp) K: Penjualan (Rp)

Sumber : Suprapti, dkk (2022:3)

Tabel II.4
Format Jurnal Khusus Pembelian

										Hal :
Tanggal	No Bukti	Perkiraan/Keterangan	Reff	Syarat	Debit				Kredit	
					Pembelian (Rp)	Serba-serbi			Utang Dagang (Rp)	
						Perkiraan	Reff	Jumlah (Rp)		

Sumber : Suprapti, dkk (2022:3)

Tabel II.5
Format Jurnal Khusus Penerimaan Kas

										Hal :	
Tanggal	No Bukti	Perkiraan/Keterangan	Reff	Debit				Kredit			
				Kas (Rp)	Pot. Penj (Rp)	Piutang Dagang (Rp)	Penjualan (Rp)	Serba-serbi			
								Perkiraan	Reff	Jumlah (Rp)	

Sumber : Suprapti, dkk (2022:2)

Tabel II.6
Format Jurnal Khusus Pengeluaran Kas

										Hal :
Tanggal	No Bukti	Perkiraan/Keterangan	Reff	Debit					Kredit	
				Utang Dagang (Rp)	Pembelian (Rp)	Serba-serbi			Kas (Rp)	Pot. Pemb (Rp)
						Perkiraan	Reff	Jumlah (Rp)		

Sumber : Suprapti, dkk (2022:3)

c. Buku Besar

Menurut Rudianto (2009:4), buku besar merupakan kumpulan seluruh akun yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang saling berkaitan dan digunakan sebagai dasar dalam pencatatan laporan keuangan. Buku besar dapat disajikan dalam beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Secara umum, terdapat tiga bentuk buku besar yang sering digunakan, yaitu bentuk T, bentuk *staffel* berkolom saldo rangkap, dan bentuk skontro. Bentuk buku besar disajikan pada tabel II.7 berikut ini,

Tabel II.7
Format Buku Besar Bentuk *Staffel* Berkolom Saldo Rangkap

Nama Rekening
No. Rek.....

Tgl	Ket	Ref	D	K	Saldo	
					D	K

Sumber : Bahri (2016:53)

d. Neraca Saldo

Menurut Brian (2020), Neraca saldo merupakan daftar yang memuat saldo akhir dari seluruh akun dalam buku besar pada suatu periode tertentu. Penyusunan neraca saldo dilakukan dengan memindahkan saldo masing-masing akun dari buku besar ke dalam

format neraca saldo, sehingga seluruh saldo dapat dirangkum dan diperiksa. Jumlah total saldo sisi debit dan kredit dalam neraca saldo harus seimbang. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah debit dan kredit, maka menunjukkan adanya kesalahan dalam pencatatan dan perlu ditelusuri lebih lanjut. Bentuk neraca saldo disajikan pada tabel II.8 berikut ini,

Tabel II.8
Format Neraca Saldo

Rumah Laundry
Neraca Saldo
Per 31 Desember 2020

No. Akun	Akun	Debit	Kredit
111	Kas	xxx	-
112	Piutang Usaha	xxx	-
dst.			
211	Utang Usaha	-	xxx
311	Modal	-	xxx
dst.			

Sumber : Hertina (2024:43)

7. Penyajian Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM

Menurut DSAK IAI, 2016 laporan keuangan yang mencakup transaksi, peristiwa, dan kondisi bisnis lainnya secara wajar dan jujur, mewajibkan entitas memberikan informasi karena alasan berikut:

- a. Relevan : Pengguna dapat memanfaatkan informasi saat mengambil keputusan.
- b. Representasi yang akurat : Data disajikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa kesalahan.

- c. Keterbandingan : Menentukan dan menilai status dan kinerja keuangan, data dapat dibandingkan antar bisnis dan antar periode.
- d. Pemahaman : Informasi yang diberikan dapat dipahami secara efektif oleh pengguna.

Laporan keuangan minimal yang disyaratkan dalam SAK EMKM meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan yang memuat kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha dan bank, ekuitas.

Tabel II.9
Format Laporan Posisi Keuangan Sesuai SAK EMKM

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
ASET	Catatan	20x8	20x7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		xxx	xxx
Piutang usaha			
Persediaan	6	xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap			
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha			
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal			
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Sumber : SAK EMKM IAI, 2024

- b. Laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan, beban pajak dan beban keuangan.

Tabel II.10
Format Laporan Laba Rugi Sesuai SAK EMKM

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
PENDAPATAN	<u>Catatan</u>	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber : SAK EMKM IAI, 2024

- c. Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan ringkasan yang berisi informasi dan kebijakan akuntansi dalam suatu perusahaan, umumnya berisi gambaran umum perusahaan, penerapan pernyataan dan interpretasi SAK, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, arus kas, dan lainnya.

Catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, mencakup kebijakan akuntansi, serta informasi tambahan dan rincian akun

tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga membantu pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Tabel II.11
Format Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7	
1.	<p>UMUM</p> <p>Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p>
2.	<p>IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang usaha Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i>. <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.</p> <p>e. Aset Tetap Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.</p>

Lanjutan Tabel II.11

ENTITAS		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7		
f. Pengakuan Pendapatan dan Beban		
Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.		
g. Pajak Penghasilan		
Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.		
3. KAS		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx
4. GIRO		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
5. DEPOSITO		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga Deposito:		
Rupiah	<u>20x8</u> 4,50%	<u>20x7</u> 5,00%
6. PIUTANG USAHA		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

Lanjutan Tabel II.11

ENTITAS			
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
7.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Sewa	XXX	XXX
	Asuransi	XXX	XXX
	Lisensi dan perizinan	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
	Jumlah	XXX	XXX
8.	UTANG BANK		
	Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.		
9.	SALDO LABA		
	Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
10.	PENDAPATAN PENJUALAN		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Penjualan	XXX	XXX
	Retur penjualan	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
	Jumlah	XXX	XXX
11.	BEBAN LAIN-LAIN		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Bunga pinjaman	XXX	XXX
	Lain-lain	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
	Jumlah	XXX	XXX
12.	BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Pajak penghasilan	XXX	XXX

Sumber : SAK EMKM IAI, 2024

C. Kerangka Pikir

Gambar 1
Kerangka Pikir

